



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALPINANG

Kompleks Perkantoran
Pemprov. Kep. Bangka Belitung,
Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang 33149
Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : sppmhkp.pangkalpinang@kkp.go.id

20
26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Sebagai bagian dari siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, khususnya untuk periode Triwulan I atau Januari sampai dengan Maret 2026.

Penyusunan laporan ini berfungsi sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, serta instrumen evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang, baik dalam aspek pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan, penerapan sistem jaminan mutu, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pegawai Stasiun PPMHKP Pangkalpinang serta para pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas selama Triwulan I Tahun 2026. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Pangkalpinang, 6 April 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang



Dedy Arief Hendryanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi	3
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Visi dan Misi	6
2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	7
2.3. Pengukuran Kinerja	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja	11
3.2. Analisis dan Evaluasi	13
3.3. Realisasi Anggaran	25
3.4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	27
BAB 4. PENUTUP	29
4.1. Kesimpulan	29
4.2. Rekomendasi	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026	8
Tabel 2	Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 3	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I 2025	26
Tabel 4	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I 2025	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	3
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sampai dengan bulan Maret 2026 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengukuran kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dilakukan terhadap 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data pada aplikasi e-Kinerja/Kinerjaku per Maret 2026, terdapat 5 IKU yang telah memiliki realisasi kinerja, sedangkan 6 IKU lainnya belum memiliki realisasi pada periode Triwulan I karena pengukuran atau penilaian kinerjanya belum jatuh tempo dan akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Secara umum, capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Maret 2026 tercatat sebesar 118,29, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja organisasi telah berjalan optimal pada indikator-indikator yang telah memiliki realisasi. Capaian tersebut terutama didukung oleh kinerja pada aspek pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, transparansi pengadaan barang/jasa, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan, serta kualitas pelayanan publik.

Adapun indikator yang telah memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 meliputi: Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan realisasi 100,00 dan capaian 120,00%; Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan realisasi 99,07 dan capaian 120,00%; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja dengan realisasi 100,00 dan capaian 116,28%; Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP dengan realisasi 100,00 dan capaian 120,00%; serta Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 3,97 dan capaian 113,43%.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2026 memiliki total pagu sebesar Rp5.396.679.000. Sampai dengan akhir Triwulan I atau periode Januari sampai dengan Maret 2026, realisasi belanja mencapai Rp1.130.484.774 atau sebesar 20,95%, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.266.194.226. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp735.054.940 atau 23,16% dari

pagu belanja pegawai, serta belanja barang sebesar Rp395.429.834 atau 17,79% dari pagu belanja barang.

Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran Triwulan I seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni, dengan pagu sebesar Rp5.204.669.000 dan realisasi sebesar Rp1.130.484.774 atau 21,72%. Sementara itu, sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pagu sebesar Rp192.010.000 belum terealisasi pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi terbesar terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu sebesar Rp5.060.639.000 dan realisasi sebesar Rp1.128.234.774 atau 22,29%. Sementara itu, kegiatan Pengendalian Mutu memiliki pagu sebesar Rp145.000.000 dengan realisasi Rp750.000 atau 0,52%, dan kegiatan Manajemen Mutu memiliki pagu sebesar Rp191.040.000 dengan realisasi Rp1.500.000 atau 0,79%.

Sementara itu, indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau secara berkala pada triwulan berikutnya. Indikator tersebut belum dapat dinilai sebagai tidak tercapai, karena mekanisme pengukuran, jadwal evaluasi, atau periode penilaiannya belum tersedia pada Triwulan I.

Capaian Triwulan I Tahun 2026 ini menjadi modal awal yang positif bagi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan. Ke depan, upaya peningkatan kinerja akan terus dilakukan melalui penguatan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan data dukung kinerja secara tepat waktu, percepatan pelaksanaan kegiatan teknis, serta optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut setiap instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan organisasi telah berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja (LKJ) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Melalui laporan ini, capaian kinerja organisasi dapat diukur, dianalisis, dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Peran tersebut dilaksanakan melalui pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, penerapan sistem jaminan mutu, pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja organisasi sampai dengan bulan Maret 2026. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian indikator kinerja, analisis terhadap realisasi kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengukuran kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 5 IKU yang telah memiliki realisasi sampai dengan Maret 2026, sedangkan 6 IKU lainnya belum memiliki realisasi karena periode pengukuran atau penilaiannya belum jatuh tempo pada Triwulan I.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pelaksanaan kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dapat terdokumentasi secara objektif, terukur, dan akuntabel. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja pada periode berikutnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mempunyai peran dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan arah kebijakan kelembagaan BPPMHKP Tahun 2025–2029, Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dibentuk sebagai perpanjangan tangan operasional Badan dalam memastikan implementasi pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan berjalan efektif, konsisten, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan UPT mendukung pelaksanaan inspeksi, surveilans, pengujian, sertifikasi, dan verifikasi standar mutu secara langsung di lapangan dari hulu sampai hilir rantai pasok.

Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang berperan mendukung sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui pelayanan teknis kepada masyarakat dan pelaku usaha, pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, penerapan sistem jaminan mutu, serta dukungan terhadap peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa produk kelautan dan perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Adapun fungsi utama Stasiun PPMHKP Pangkalpinang antara lain meliputi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pelaksanaan inspeksi dan surveilans terhadap unit usaha, pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai kewenangan, fasilitasi sertifikasi sistem jaminan mutu, pelayanan kepada pengguna jasa, serta penyediaan data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan BPPMHKP.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang disusun untuk memastikan pelaksanaan layanan berjalan efektif, responsif, dan akuntabel. Struktur organisasi terdiri atas Kepala Stasiun, urusan umum, serta kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional berperan dalam mendukung pelaksanaan

pengendalian mutu, pengawasan, pelayanan teknis, pengujian, administrasi layanan, serta kegiatan pendukung lainnya.

Dengan struktur organisasi tersebut, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan secara optimal. Penguatan tugas, fungsi, dan kelembagaan menjadi dasar penting dalam mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026 serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan dan strategi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029. Dalam dokumen Renstra BPPMHKP, pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diarahkan untuk memperkuat sistem jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang berperan dalam mendukung pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peran tersebut dilaksanakan melalui penguatan layanan inspeksi, surveilans, pengujian, sertifikasi, pembinaan pelaku usaha, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kualitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Strategi organisasi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Strategi tersebut mencakup peningkatan efektivitas pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer dan pasca panen, penguatan penerapan

sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam mendukung sasaran peningkatan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan terhadap produk dan pelaku usaha. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk kelautan dan perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta mendukung keberterimaan produk di pasar. Strategi tersebut sejalan dengan sasaran strategis BPPMHKP yaitu meningkatnya jaminan keamanan pangan, mutu, dan kelayakan usaha produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha bersertifikasi.

Selain itu, organisasi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Penguatan tata kelola ini mencakup pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja, peningkatan transparansi pengadaan barang/jasa melalui pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada SIRUP, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui pemantauan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada Triwulan I Tahun 2026, strategi pelaksanaan kinerja difokuskan pada indikator-indikator yang telah memiliki realisasi sampai dengan bulan Maret 2026. Dari 11 Indikator Kinerja Utama, terdapat 5 indikator yang telah memiliki realisasi, yaitu indikator produksi primer, produksi pasca panen, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, RUP PBJ yang diumumkan pada SIRUP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, indikator lainnya tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja dan akan dilakukan pengukuran pada periode berikutnya sesuai jadwal pelaksanaan dan mekanisme penilaiannya.

Dengan arah kebijakan dan strategi tersebut, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga akuntabilitas kinerja organisasi dalam rangka mendukung pencapaian target BPPMHKP Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Pangkalpinang disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai pelaksanaan kinerja organisasi selama periode Januari sampai dengan Maret 2026. Penyajian laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja,

analisis dan evaluasi terhadap indikator kinerja, realisasi anggaran, serta rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan - Menyajikan uraian mengenai latar belakang penyusunan laporan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, arah kebijakan dan strategi organisasi, serta sistematika penyajian laporan.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja - Menguraikan sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Bab ini juga menjelaskan mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan dalam menilai capaian indikator kinerja.
- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja - Menyajikan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, termasuk capaian indikator yang telah memiliki realisasi sampai dengan Maret 2026. Bab ini juga memuat analisis dan evaluasi atas capaian kinerja, penjelasan terhadap indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, serta realisasi anggaran berdasarkan sumber dana, jenis kegiatan, dan jenis belanja.
- d. Bab IV Penutup - Memuat kesimpulan umum atas pelaksanaan kinerja Triwulan I Tahun 2026 serta rekomendasi langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

Dengan sistematika tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel mengenai perkembangan capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Triwulan I Tahun 2026.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Perencanaan kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, BPPMHKP menetapkan visi sebagai berikut:

“Menjadi otoritas kompeten pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang berdaulat, inovatif, dan diakui global untuk mewujudkan produk perikanan Indonesia yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.”

Visi tersebut mencerminkan peran strategis BPPMHKP dalam menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di daerah, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang mendukung pencapaian visi tersebut melalui pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam mendukung visi tersebut, BPPMHKP menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat jaminan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
2. Mendorong peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui sistem pengendalian mutu yang modern, kredibel, dan diakui secara global.
3. Memperkuat kolaborasi dan sinergi dengan meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha untuk menciptakan budaya mutu.
4. Membangun organisasi yang profesional dan berintegritas dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengendalian mutu.
5. Mewujudkan tata kelola pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang transparan, digital, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi nasional maupun internasional.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang melaksanakan peran operasional dalam mendukung sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui pelayanan teknis, pengawasan mutu, pembinaan pelaku usaha, pengujian, sertifikasi, serta penguatan tata kelola kinerja. Pelaksanaan peran tersebut diarahkan untuk

memastikan produk kelautan dan perikanan yang dihasilkan dan beredar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Pada Tahun 2026, dukungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang terhadap visi dan misi BPPMHKP diwujudkan melalui pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator-indikator tersebut menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi, baik pada aspek pengendalian mutu sektor produksi primer dan pasca panen, penguatan sistem jaminan mutu, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

2.2. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran kinerja merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu sebagai penjabaran dari tugas, fungsi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Indikator kinerja digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja organisasi.

Pada Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 serta selaras dengan Rencana Strategis BPPMHKP Tahun 2025–2029. Indikator kinerja tersebut menggambarkan pelaksanaan tugas Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, penguatan sistem jaminan mutu, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Secara umum, sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 terdiri atas sasaran yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan data realisasi sampai dengan bulan Maret 2026. Dari 11 IKU yang ditetapkan, terdapat 5 IKU yang telah memiliki realisasi pada Triwulan I, sedangkan 6 IKU lainnya belum memiliki realisasi karena periode pengukuran, pelaksanaan kegiatan, atau penilaiannya belum jatuh tempo pada periode Triwulan I.

Rincian sasaran, indikator, dan target kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026

Kode	Indikator Kinerja	Target 2026	Target TW I
IKK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72	72
IKK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72	72
IKK.3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	71	
IKK.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	82,5	
IKK.5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	77	
IKK.6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	86,2	
IKK.7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	86	86
IKK.8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	92,1	
IKK.9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	71,75	
IKK.10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	77	77
IKK.11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	3,5	3,5

Berdasarkan tabel tersebut, indikator yang telah memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 adalah IKK.1, IKK.2, IKK.7, IKK.10, dan IKK.11. Kelima indikator tersebut menjadi dasar utama dalam penilaian capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang sampai dengan Maret 2026.

Sementara itu, IKK.3, IKK.4, IKK.5, IKK.6, IKK.8, dan IKK.9 belum memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Kondisi tersebut tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, melainkan karena indikator-indikator tersebut memiliki jadwal pengukuran, mekanisme penilaian, atau periode pelaksanaan yang belum jatuh tempo pada Triwulan I. Indikator tersebut tetap menjadi komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dilakukan pemantauan serta pengukuran pada periode berikutnya.

2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai dalam periode pelaporan.

Pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, pengukuran kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dilakukan berdasarkan data capaian sampai dengan bulan Maret 2026. Data yang digunakan mengacu pada hasil pelaporan dan pemantauan melalui aplikasi e-Kinerja/Kinerjaku, khususnya pada kolom Capaian Maret sebagai dasar penilaian capaian kinerja Triwulan I.

Nilai capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target, dengan memperhatikan karakteristik atau polarisasi masing-masing indikator. Secara umum, indikator yang bersifat maximize dihitung dengan prinsip bahwa semakin tinggi realisasi dibandingkan target, maka semakin baik capaian kinerjanya. Adapun batas maksimum capaian indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran adalah sebesar 120%.

Formula umum pengukuran capaian kinerja untuk indikator yang bersifat maximize adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Dalam hal realisasi melampaui target, capaian kinerja tetap dibatasi sesuai ketentuan nilai maksimum, yaitu 120%. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kewajaran penilaian kinerja serta memastikan hasil pengukuran tetap proporsional dan dapat dibandingkan antarindikator.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Maret 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 118,29. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2026 berada pada kategori sangat baik/istimewa, terutama didukung oleh indikator-indikator yang telah memiliki realisasi pada periode pelaporan.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

Angka Capaian	Kategori / Predikat
---------------	---------------------

>100 – 120	Istimewa
------------	----------

>90 – 100	Sangat Baik
-----------	-------------

>80 – 90	Baik
----------	------

>70 – 80	Cukup
----------	-------

>60 – 70	Kurang
----------	--------

<60	Sangat Kurang
-----	---------------

Pada Triwulan I Tahun 2026, dari 11 Indikator Kinerja Utama Stasiun PPMHKP Pangkalpinang, terdapat 5 indikator yang telah memiliki realisasi, yaitu IKSK.1, IKSK.2, IKSK.7, IKSK.10, dan IKSK.11. Sementara itu, 6 indikator lainnya belum memiliki realisasi pada periode Triwulan I karena jadwal pengukuran, mekanisme penilaian, atau pelaksanaan kegiatannya belum jatuh tempo.

Dengan demikian, indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, melainkan sebagai indikator yang belum dapat dinilai pada periode pelaporan. Seluruh indikator tersebut tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja organisasi dan akan terus dipantau untuk mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

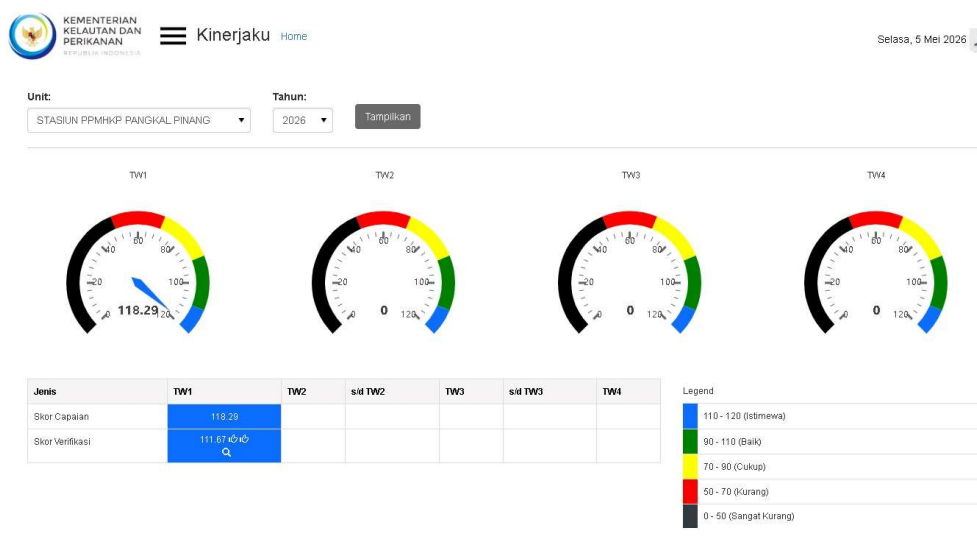
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada periode pelaporan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi secara objektif dan terukur.

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Triwulan I Tahun 2026 diukur berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan bulan Maret 2026 sebagaimana tercantum dalam aplikasi e-Kinerja/Kinerjaku. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PPMHKP Pangkalpinang sampai dengan Maret 2026 tercatat sebesar 118,29. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada Triwulan I Tahun 2026 berada pada kategori Istimewa.



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Pada Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memiliki 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat 5 IKU yang telah memiliki realisasi, sedangkan 6 IKU lainnya belum memiliki realisasi pada periode pelaporan. Indikator yang belum memiliki realisasi tersebut tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, melainkan karena periode pengukuran, mekanisme penilaian, atau pelaksanaan kegiatannya belum jatuh tempo pada Triwulan I.

Lima indikator yang telah memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 terdiri atas indikator pengendalian dan pengawasan mutu sektor produksi primer, pengendalian dan pengawasan mutu sektor pasca panen, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja, rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP, serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Kelima indikator tersebut memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja organisasi sampai dengan Maret 2026.

Rincian capaian kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Triwulan I Tahun 2026

Kode	Indikator Kinerja	Target Maret	Realisasi Maret	Capaian Maret
IKK.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72,00	100,00	120,00
IKK.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	72,00	99,07	120,00
IKK.3	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	-	-	-
IKK.4	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	-	-	-
IKK.5	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	-	-	-
IKK.6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	-	-	-
IKK.7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	86,00	100,00	116,28
IKK.8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	-	-	-
IKK.9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Nilai)	-	-	-
IKK.10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)	77,00	100,00	120,00
IKK.11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)	3,50	3,97	113,43

Berdasarkan tabel tersebut, capaian tertinggi diperoleh pada IKK.1, IKK.2, dan IKK.10 dengan capaian masing-masing sebesar 120,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan pengendalian mutu pada sektor produksi primer dan pasca panen serta pemenuhan kewajiban pengumuman RUP PBJ pada SIRUP telah berjalan sangat baik sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.

Selain itu, IKK.7 terkait persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja terealisasi sebesar 100,00 dengan capaian 116,28%. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

IKK.11 terkait Indeks Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar 3,97 dan capaian 113,43%. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Triwulan I Tahun 2026 mendapatkan penilaian positif dari pengguna layanan.

Sementara itu, IKK.3, IKK.4, IKK.5, IKK.6, IKK.8, dan IKK.9 belum memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Indikator-indikator tersebut akan dilakukan pengukuran pada periode berikutnya sesuai dengan jadwal penilaian, ketersediaan data dukung, serta mekanisme pengukuran kinerja yang berlaku.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Stasiun PPMHKP Pangkalpinang telah mengawali pelaksanaan kinerja tahun berjalan dengan baik. Capaian NKO sebesar 118,29 menjadi modal positif dalam mendorong pencapaian target kinerja sampai dengan akhir Tahun 2026 melalui penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas layanan, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan data dukung kinerja secara tepat waktu.

3.2. Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk memberikan penjelasan atas realisasi indikator kinerja yang telah dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Analisis ini mencakup capaian indikator yang telah memiliki realisasi, faktor pendukung keberhasilan, serta penjelasan terhadap indikator yang belum memiliki realisasi pada periode pelaporan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memiliki 11 Indikator Kinerja Utama. Dari jumlah tersebut, 5 indikator telah memiliki realisasi sampai dengan Maret 2026, sedangkan 6 indikator lainnya belum memiliki realisasi karena periode pengukuran atau penilaiannya belum jatuh tempo. Oleh karena itu, evaluasi pada Triwulan I difokuskan pada indikator yang telah memiliki realisasi, sementara indikator yang belum terealisasi tetap dipantau sebagai bagian dari komitmen pencapaian kinerja tahun berjalan.

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IKK.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer. Sektor produksi primer merupakan bagian hulu dalam rantai sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, sehingga pemenuhan standar pada tahap ini menjadi sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pada Triwulan I Tahun 2026, target IKK.1 ditetapkan sebesar 72,00%. Berdasarkan data capaian pada aplikasi e-Kinerja/Kinerjaku sampai dengan bulan Maret 2026, realisasi indikator ini mencapai 100,00%, dengan capaian kinerja sebesar 120,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah kerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang telah terlaksana dengan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian maksimal tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pelaku usaha sektor produksi primer. Selain itu, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan pangan turut menjadi faktor penting dalam pencapaian indikator ini. Pelaksanaan koordinasi internal yang baik juga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.

Dengan capaian sebesar 120,00%, IKK.1 berada pada kategori Istimewa. Keberhasilan ini menjadi modal awal yang positif bagi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dalam memperkuat sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui pengawasan berkelanjutan, peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha, serta pemenuhan data dukung kinerja secara tepat waktu dan akurat.

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)										
Realisasi TW I 2021-2025					REALISASI 2026					RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	120	72	72	100	138.89	138.89	70	142.86

IKK.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen. Sektor pasca panen mencakup tahapan penanganan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Pemenuhan standar pada sektor ini menjadi penting untuk memastikan produk yang sampai kepada konsumen maupun pelaku usaha tetap aman, bermutu, dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pada Triwulan I Tahun 2026, target IKK.2 ditetapkan sebesar 72,00%. Berdasarkan data capaian pada aplikasi e-Kinerja/Kinerjaku sampai dengan bulan Maret 2026, realisasi indikator ini mencapai 99,07%, dengan capaian kinerja sebesar 120,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen di wilayah kerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sektor pasca panen, termasuk pemantauan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada unit penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan mutu, sanitasi, higiene, serta penerapan sistem jaminan mutu turut menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian indikator ini.

Dengan capaian sebesar 120,00%, IKK.2 berada pada kategori Istimewa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian mutu pada sektor pasca panen telah mendukung upaya penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui

pengawasan berkelanjutan, pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta peningkatan konsistensi penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan										
IK-2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)										
Realisasi TW I 2021-2025					REALISASI 2026					RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	-	120	72	72	99.07	137.60	137.60	70	141.53

Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

IKK.3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat implementasi metode terstandar dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Penerapan metode terstandar menjadi penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan, pengujian, inspeksi, dan pengendalian mutu dilaksanakan secara konsisten, objektif, tertelusur, serta sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.3 ditetapkan sebesar 71,00% dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, melainkan ditargetkan realisasinya pada Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 71,00%. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.3 memang belum menjadi indikator yang diukur pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Indikator ini tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau secara berkala untuk memastikan kesiapan pencapaian target pada akhir tahun.

Upaya yang perlu dilakukan pada periode berikutnya adalah mempersiapkan dokumen dan data dukung implementasi metode terstandar, memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu dengan metode yang ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait agar proses pengukuran pada Triwulan IV dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan demikian, capaian IKK.3 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai, karena target dan realisasi indikator ini direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2026. Pemantauan tetap dilakukan sebagai langkah antisipatif agar target tahunan sebesar 71,00% dapat tercapai sesuai rencana.

Sasaran Kegiatan 3: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

IKK.4. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Indeks Profesionalitas ASN menggambarkan kualitas pegawai berdasarkan beberapa aspek utama, antara lain kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indikator ini menjadi penting karena kualitas sumber daya manusia aparatur berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas tata kelola organisasi.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.4 ditetapkan sebesar 82,50 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I. Target periodik IKK.4 ditetapkan pada Triwulan II sebesar 82,50 dan Triwulan IV sebesar 82,50. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.4 memang belum menjadi indikator yang diukur pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Indikator ini tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau pada periode berikutnya sesuai jadwal penilaian.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain memastikan pemutakhiran data kepegawaian, mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, menjaga kualitas capaian kinerja

individu, serta meningkatkan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku. Penguatan aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target Indeks Profesionalitas ASN pada periode pengukuran berikutnya.

Dengan demikian, capaian IKK.4 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai, karena target dan realisasi indikator ini direncanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2026. Pemantauan tetap dilakukan agar target tahunan sebesar 82,50 dapat tercapai sesuai rencana.

IKK.5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pembangunan integritas di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Pembangunan integritas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam memperkuat budaya kerja berintegritas, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan satuan kerja.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.5 ditetapkan sebesar 77,00 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, melainkan ditargetkan realisasinya pada Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 77,00. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.5 memang belum menjadi indikator yang diukur pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Indikator ini tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau secara berkala untuk memastikan kesiapan pencapaian target pada akhir tahun.

Upaya yang perlu dilakukan pada periode berikutnya antara lain memperkuat internalisasi nilai integritas kepada seluruh pegawai, memastikan pemenuhan dokumen dan data dukung pembangunan integritas, meningkatkan kualitas pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat, serta menjaga kepatuhan terhadap pelaporan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dengan demikian, capaian IKK.5 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai, karena target dan realisasi indikator ini direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2026.

Pemantauan tetap dilakukan agar target tahunan sebesar 77,00 dapat tercapai sesuai rencana.

IKK.6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Penilaian Mandiri SAKIP mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta capaian kinerja. Indikator ini menjadi penting karena menunjukkan tingkat kualitas penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil dan akuntabel.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.6 ditetapkan sebesar 86,20 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, melainkan ditargetkan realisasinya pada Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 86,20. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.6 memang belum menjadi indikator yang diukur pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Indikator ini tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau secara berkala untuk memastikan kesiapan pencapaian target pada akhir tahun.

Upaya yang perlu dilakukan pada periode berikutnya antara lain meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu, memastikan keselarasan antara sasaran, indikator, target, dan realisasi kinerja, serta memperkuat evaluasi internal atas pelaksanaan kinerja. Selain itu, pemenuhan data dukung SAKIP perlu dilakukan secara tertib agar proses penilaian mandiri dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, capaian IKK.6 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai, karena target dan realisasi indikator ini direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2026. Pemantauan tetap dilakukan agar target tahunan sebesar 86,20 dapat tercapai sesuai rencana.

IKK.7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan, memperbaiki proses bisnis, serta mendorong pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan akuntabel.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.7 ditetapkan sebesar 86,00% dengan jenis perhitungan data rata-rata. Berdasarkan rencana capaian kinerja, target indikator ini ditetapkan pada setiap triwulan, yaitu 86,00% pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi IKK.7 mencapai 100,00%, dengan capaian kinerja sebesar 116,28%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perbaikan kinerja di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan mencerminkan komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat, serta menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan.

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, koordinasi internal yang baik, serta pemantauan tindak lanjut secara berkala. Selain itu, pemanfaatan rekomendasi sebagai dasar perbaikan proses kerja turut mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Dengan capaian sebesar 116,28%, IKK.7 berada pada kategori Istimewa. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui penguatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, pemenuhan bukti dukung secara tertib, serta pemanfaatan rekomendasi pengawasan sebagai bahan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi.

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang										
IK-7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)										
Realisasi TW I 2021-2025					REALISASI 2026					RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	120	117.65	86	86	100	116.28	116.28	85	117.65

IKK.8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. IKPA mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan anggaran, termasuk kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan perencanaan, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pengelolaan uang persediaan, penyerapan anggaran, serta capaian output kegiatan.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.8 ditetapkan sebesar 92,10 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I. Target periodik IKK.8 ditetapkan pada Triwulan II sebesar 92,10 dan Triwulan IV sebesar 92,10. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Meskipun nilai IKPA belum tersedia pada Triwulan I, pelaksanaan anggaran tetap dipantau melalui realisasi belanja sampai dengan bulan Maret 2026. Berdasarkan data realisasi belanja, total pagu anggaran Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.396.679.000, dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp1.130.484.774 atau 20,95%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp4.266.194.226.

Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp735.054.940 atau 23,16% dari pagu belanja pegawai sebesar Rp3.173.419.000, serta belanja barang sebesar Rp395.429.834 atau 17,79% dari pagu belanja barang sebesar Rp2.223.260.000. Capaian realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan I telah berjalan, meskipun masih perlu dilakukan percepatan khususnya pada belanja barang dan kegiatan teknis pada triwulan berikutnya.

Kondisi belum adanya realisasi nilai IKPA pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.8 memang baru ditargetkan pada Triwulan II dan Triwulan IV. Upaya yang perlu dilakukan pada periode berikutnya antara lain menjaga ketepatan realisasi terhadap rencana penarikan dana, mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa, memastikan penyelesaian tagihan tepat waktu, serta melakukan pemantauan capaian output secara berkala.

Dengan demikian, capaian IKK.8 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai berdasarkan nilai IKPA, namun pelaksanaan anggaran tetap menjadi perhatian penting dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Pemantauan dan percepatan pelaksanaan anggaran perlu terus dilakukan agar target tahunan sebesar 92,10 dapat tercapai sesuai rencana.

IKK.9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran pada Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencerminkan kesesuaian antara perencanaan kegiatan, alokasi anggaran, rencana penarikan dana, dan pelaksanaan anggaran. Kualitas perencanaan anggaran yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja organisasi.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.9 ditetapkan sebesar 71,75 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III, melainkan ditargetkan realisasinya pada Triwulan IV Tahun 2026 sebesar 71,75. Dengan demikian, sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, indikator ini belum memiliki realisasi karena periode pengukuran dan penilaian kinerjanya belum jatuh tempo.

Kondisi belum adanya realisasi pada Triwulan I tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik, IKK.9 memang belum menjadi indikator yang diukur pada periode Januari sampai dengan Maret 2026. Indikator ini tetap menjadi bagian dari komitmen kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dan akan dipantau secara berkala untuk memastikan kesiapan pencapaian target pada akhir tahun.

Upaya yang perlu dilakukan pada periode berikutnya antara lain menjaga kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja dan anggaran, memantau rencana penarikan dana secara berkala, meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, serta

memastikan setiap perubahan atau penyesuaian anggaran dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara pengelola perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan juga perlu diperkuat agar kualitas perencanaan anggaran tetap terjaga.

Dengan demikian, capaian IKK.9 pada Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dinilai, karena target dan realisasi indikator ini direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2026. Pemantauan tetap dilakukan agar target tahunan sebesar 71,75 dapat tercapai sesuai rencana.

IKK.10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan transparansi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi SIRUP. Pengumuman RUP pada SIRUP merupakan bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi pengadaan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta perencanaan pengadaan barang/jasa yang tertib dan dapat dipantau oleh publik.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.10 ditetapkan sebesar 77,00% dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, target indikator ini ditetapkan pada setiap triwulan, yaitu 77,00% pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi IKK.10 mencapai 100,00%, dengan capaian kinerja sebesar 120,00%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Stasiun PPMHKP Pangkalpinang telah melaksanakan kewajiban pengumuman RUP PBJ pada SIRUP secara optimal pada Triwulan I Tahun 2026. Realisasi sebesar 100,00% menggambarkan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah diumumkan sesuai ketentuan, sehingga mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain adanya koordinasi yang baik antara pengelola perencanaan, pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan operator SIRUP dalam memastikan data rencana pengadaan telah disusun dan diumumkan secara tepat waktu. Selain itu, komitmen satuan kerja dalam menjaga keterbukaan informasi pengadaan turut mendukung tercapainya indikator ini secara maksimal.

Dengan capaian sebesar 120,00%, IKK.10 berada pada kategori Istimewa. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan melalui pemutakhiran data RUP apabila terdapat perubahan anggaran atau rencana kegiatan, peningkatan ketelitian dalam penginputan data, serta koordinasi berkelanjutan antarunit terkait agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap tertib, transparan, dan akuntabel.

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang											
IK-10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (%)											
Realisasi TW I 2021-2025					REALISASI 2026					RENSTRA 2025-2029		
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target RENSTRA	
-	-	-	-	120	77	77	100	129.87	129.87	76	131.58	

IKK.11. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PPMHKP Pangkalpinang. Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai mutu pelayanan, yang mencakup aspek persyaratan layanan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan IKK.11 ditetapkan sebesar 3,50 dengan jenis perhitungan data nilai posisi akhir. Berdasarkan rencana capaian kinerja, target indikator ini ditetapkan pada setiap triwulan, yaitu 3,50 pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi IKK.11 mencapai 3,97, dengan capaian kinerja sebesar 113,43%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada Triwulan I Tahun 2026 telah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari masyarakat dan pengguna layanan. Realisasi indeks sebesar 3,97 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi, bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain komitmen petugas dalam memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional, kemudahan prosedur

layanan, serta tindak lanjut terhadap masukan pengguna jasa. Selain itu, pemanfaatan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan capaian sebesar 113,43%, IKK.11 berada pada kategori Istimewa. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan budaya pelayanan prima, penyederhanaan prosedur, peningkatan kecepatan layanan, pengelolaan pengaduan secara responsif, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan pelayanan publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang.

SP.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang										
IK-11	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Pangkalpinang (Indeks)										
Realisasi TW I 2021-2025					REALISASI 2026					RENSTRA 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Realisasi thd Target TW I 2026	% Realisasi thd Target 2026	Target	% Capaian thd Target RENSTRA
-	-	-	112.94	107.25	3.5	3.5	3.97	113.43	113.43	3.36	118.15

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.396.679.000. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp3.173.419.000 dan belanja barang sebesar Rp2.223.260.000. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 atau periode Januari sampai dengan Maret 2026, realisasi anggaran mencapai Rp1.130.484.774 atau sebesar 20,95% dari total pagu anggaran. Dengan demikian, sisa anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp4.266.194.226.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.054.940 atau 23,16% dari pagu belanja pegawai sebesar Rp3.173.419.000. Sementara itu, realisasi belanja barang sebesar Rp395.429.834 atau 17,79% dari pagu belanja barang sebesar Rp2.223.260.000. Realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan I telah berjalan, terutama untuk mendukung belanja operasional dan pelaksanaan tugas satuan kerja.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Stasiun PPMHKP Pangkalpinang terdiri atas Rupiah Murni sebesar Rp5.204.669.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

sebesar Rp192.010.000. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni, yaitu sebesar Rp1.130.484.774 atau 21,72% dari pagu Rupiah Murni. Sementara itu, anggaran yang bersumber dari PNBPN belum terealisasi pada periode Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi terbesar terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan pagu sebesar Rp5.060.639.000 dan realisasi sebesar Rp1.128.234.774 atau 22,29%. Selanjutnya, kegiatan Pengendalian Mutu memiliki pagu sebesar Rp145.000.000 dengan realisasi sebesar Rp750.000 atau 0,52%, sedangkan kegiatan Manajemen Mutu memiliki pagu sebesar Rp191.040.000 dengan realisasi sebesar Rp1.500.000 atau 0,79%.

Rekapitulasi realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi TW I	Persentase
1	Dukungan Manajemen Internal	Rp5.060.639.000	Rp1.128.234.774	22,29%
2	Pengendalian Mutu	Rp145.000.000	Rp750.000	0,52%
3	Manajemen Mutu	Rp191.040.000	Rp1.500.000	0,79%
	Total	Rp5.396.679.000	Rp1.130.484.774	20,95%

Tabel 4. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TW I	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp3.173.419.000	Rp735.054.940	23,16%
2	Belanja Barang	Rp2.223.260.000	Rp395.429.834	17,79%
	Total	Rp5.396.679.000	Rp1.130.484.774	20,95%

Secara umum, realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai tahap awal tahun anggaran. Namun demikian, realisasi pada kegiatan teknis, yaitu Pengendalian Mutu dan Manajemen Mutu, masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, khususnya kegiatan teknis yang mendukung pencapaian indikator kinerja, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.

3.4. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan upaya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi tidak hanya dilihat dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan output dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.396.679.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Maret 2026 sebesar Rp1.130.484.774 atau 20,95%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan pada awal tahun anggaran, terutama untuk mendukung belanja pegawai, operasional perkantoran, dan sebagian pelaksanaan kegiatan pendukung tugas dan fungsi organisasi.

Dari sisi capaian kinerja, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Maret 2026 sebesar 118,29. Capaian ini menunjukkan bahwa pada indikator-indikator yang telah memiliki realisasi, kinerja organisasi telah berjalan sangat baik. Dengan realisasi anggaran sebesar 20,95%, capaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Triwulan I telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target kinerja awal tahun.

Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai sebesar Rp735.054.940 atau 23,16%, sedangkan belanja barang sebesar Rp395.429.834 atau 17,79%. Realisasi belanja barang yang masih relatif rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional masih perlu diakselerasi pada triwulan berikutnya, khususnya untuk mendukung pelaksanaan pengendalian mutu, manajemen mutu, serta kegiatan teknis lainnya.

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi terbesar terdapat pada kegiatan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp1.128.234.774 atau 22,29% dari pagu kegiatan. Sementara itu, kegiatan Pengendalian Mutu baru terealisasi sebesar Rp750.000 atau 0,52%, dan kegiatan Manajemen Mutu terealisasi sebesar Rp1.500.000 atau 0,79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan manajemen telah berjalan cukup baik pada awal tahun, namun pelaksanaan kegiatan teknis masih perlu ditingkatkan agar penyerapan anggaran lebih seimbang dan selaras dengan target kinerja pada periode berikutnya.

Secara umum, efisiensi pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dinilai cukup baik karena capaian kinerja organisasi tetap menunjukkan hasil yang tinggi, meskipun realisasi anggaran masih berada pada tahap awal pelaksanaan tahun anggaran. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi pencapaian target sampai akhir tahun,

diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan, serta pemantauan berkala terhadap rencana penarikan dana dan capaian output.

Upaya peningkatan efisiensi pada triwulan berikutnya perlu diarahkan pada pelaksanaan kegiatan yang lebih proporsional, pengendalian jadwal kegiatan agar tidak menumpuk pada akhir tahun, serta optimalisasi penggunaan anggaran sesuai prioritas kinerja. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Pangkalpinang secara umum telah berjalan dengan baik, efektif, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sampai dengan Maret 2026 sebesar 118,29, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi pada periode Triwulan I berada pada kategori Istimewa.

Pada Tahun 2026, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang memiliki 11 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat 5 IKK yang telah memiliki realisasi, yaitu IKK.1, IKK.2, IKK.7, IKK.10, dan IKK.11. Sementara itu, 6 IKK lainnya belum memiliki realisasi pada Triwulan I karena periode pengukuran, jadwal penilaian, atau target periodiknya belum jatuh tempo.

Capaian kinerja pada indikator yang telah memiliki realisasi menunjukkan hasil yang sangat baik. IKK.1, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 120,00%. IKK.2, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, terealisasi sebesar 99,07% dengan capaian 120,00%.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, IKK.7, yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 116,28%. IKK.10, yaitu Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP, terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 120,00%. Selain itu, IKK.11, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, terealisasi sebesar 3,97 dengan capaian 113,43%.

Sementara itu, IKK.3, IKK.4, IKK.5, IKK.6, IKK.8, dan IKK.9 belum memiliki realisasi pada Triwulan I Tahun 2026. Kondisi tersebut tidak dimaknai sebagai ketidaktercapaian kinerja, karena sesuai rencana target periodik masing-masing indikator, pengukuran dan penilaian akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya atau pada akhir tahun.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pagu anggaran Stasiun PPMHKP Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.396.679.000. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp1.130.484.774 atau 20,95%, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.266.194.226. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran

telah berjalan pada awal tahun anggaran, meskipun kegiatan teknis masih perlu diakselerasi pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Stasiun PPMHKP Pangkalpinang telah mengawali pelaksanaan kinerja tahun berjalan dengan hasil yang positif. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi internal, percepatan pelaksanaan kegiatan teknis, pemenuhan data dukung kinerja, serta optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

4.2. Rekomendasi

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dan untuk mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Stasiun PPMHKP Pangkalpinang pada triwulan berikutnya.

Pertama, mempertahankan capaian indikator yang telah menunjukkan hasil optimal pada Triwulan I Tahun 2026, khususnya IKK.1, IKK.2, IKK.7, IKK.10, dan IKK.11. Capaian tersebut perlu dijaga melalui pengawasan berkelanjutan, pemenuhan data dukung yang tertib, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kedua, mempercepat pelaksanaan kegiatan teknis pengendalian mutu dan manajemen mutu pada Triwulan II dan Triwulan III. Hal ini penting mengingat realisasi anggaran pada kegiatan teknis masih relatif rendah pada Triwulan I, sehingga diperlukan penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih terukur agar kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Ketiga, melakukan pemantauan terhadap indikator yang belum memiliki realisasi pada Triwulan I, yaitu IKK.3, IKK.4, IKK.5, IKK.6, IKK.8, dan IKK.9. Pemantauan perlu dilakukan melalui penyiapan dokumen, data dukung, dan koordinasi dengan unit terkait agar pengukuran indikator pada periode berikutnya dapat berjalan tepat waktu dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Keempat, meningkatkan kualitas tata kelola kinerja melalui penguatan koordinasi internal antara pengelola kinerja, perencanaan, keuangan, teknis, dan pelayanan publik. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, capaian output, dan pencapaian indikator kinerja.

Kelima, mengoptimalkan realisasi anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap rencana penarikan dana, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan

negara. Percepatan realisasi anggaran perlu diarahkan terutama pada belanja barang dan kegiatan teknis yang mendukung langsung pencapaian indikator kinerja.

Keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat, penguatan budaya pelayanan prima, penyederhanaan prosedur layanan, serta peningkatan responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan Stasiun PPMHKP Pangkalpinang dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah baik pada Triwulan I serta meningkatkan pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya. Rekomendasi ini juga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam mendukung tercapainya target kinerja Tahun 2026 secara optimal.

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, Stasiun PPMHKP Pangkalpinang menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025. Tindak lanjut tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa rekomendasi periode sebelumnya tidak hanya menjadi catatan evaluasi, tetapi juga menjadi dasar perbaikan dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2026.

Rekomendasi pertama adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan kalender kegiatan dan rencana penarikan dana yang lebih presisi pada awal tahun. Pada Triwulan I Tahun 2026, tindak lanjut telah dilakukan melalui penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan pemantauan awal terhadap realisasi anggaran. Sampai dengan akhir Triwulan I, realisasi anggaran mencapai Rp1.130.484.774 atau 20,95% dari total pagu sebesar Rp5.396.679.000. Meskipun pelaksanaan anggaran telah berjalan, percepatan kegiatan teknis masih perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Rekomendasi kedua adalah pengembangan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Pada Triwulan I Tahun 2026, tindak lanjut dilakukan melalui pemanfaatan sistem layanan dan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen evaluasi kualitas pelayanan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,97 dengan capaian kinerja 113,43%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik telah berjalan baik, namun pengembangan inovasi dan integrasi data layanan masih perlu terus didorong pada periode berikutnya.

Rekomendasi ketiga adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi analis/penguji laboratorium dan inspektur mutu. Pada Triwulan I Tahun 2026, tindak lanjut diarahkan pada identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan kesiapan pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM. Upaya ini perlu dilanjutkan melalui keikutsertaan pegawai dalam pelatihan teknis, bimbingan teknis, atau kegiatan peningkatan kapasitas lain yang relevan dengan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Rekomendasi keempat adalah penguatan mitigasi risiko organisasi, terutama dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan publik. Pada Triwulan I Tahun 2026, tindak lanjut telah dilakukan melalui pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SIRUP dengan realisasi sebesar 100,00% dan capaian kinerja 120,00%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen satuan kerja dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Selain itu, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja juga telah terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 116,28%, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah dimanfaatkan sebagai instrumen mitigasi risiko dan perbaikan tata kelola.

Secara umum, tindak lanjut terhadap rekomendasi periode sebelumnya telah mulai dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026. Beberapa aspek telah menunjukkan hasil positif, khususnya pada pelayanan publik, pengumuman RUP melalui SIRUP, serta pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan. Namun demikian, beberapa tindak lanjut masih perlu diperkuat pada triwulan berikutnya, terutama percepatan pelaksanaan kegiatan teknis, peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan manajemen risiko secara berkelanjutan.